

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA JAMBI

Mega Rindiani¹, Ahmad Baidawi², Uswatun Asiah³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

Email Korespondensi: megarindiani@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk Kota Jambi, yang dalam beberapa tahun terakhir menempati posisi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Jambi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat Dinas Sosial, Bappeda, akademisi, dan masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui empat tahapan manajemen strategi, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi serta pengendalian. Strategi yang dijalankan mencakup program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta program peningkatan akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun berbagai program telah dijalankan, efektivitasnya masih terkendala oleh permasalahan akurasi data penerima bantuan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi belum berjalan secara optimal karena lemahnya integrasi program, rendahnya akuntabilitas, dan belum terbangunnya pendekatan partisipatif yang kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembenahan dari sisi sistem pendataan, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat secara aktif agar strategi yang dijalankan benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Kebijakan.

Abstract: Poverty is a complex problem faced by many regions, including Jambi City, which in recent years occupies the position with the highest poverty rate in Jambi Province. This study aims to analyze the Regional Government's strategy in overcoming poverty in Jambi City and identify the obstacles faced in its implementation. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of officials of the Social Service, Bappeda, academics, and the community receiving assistance. The results of the study show that the Regional Government's strategy is implemented through four stages of strategic management, namely environmental observation, strategy formulation, implementation, and evaluation and control. The strategies implemented include social assistance programs, economic empowerment, skills training, and programs to increase access to basic facilities such as education, health, and infrastructure. Although various programs have been implemented, their effectiveness is still constrained by the accuracy of aid recipient data, weak coordination between agencies, and the community's dependence on social assistance. This study concludes that poverty alleviation strategies in Jambi City have not been running optimally due to weak program integration, low accountability, and the lack of a strong participatory approach. Therefore, the Regional Government needs to improve in terms of the data collection system, strengthen cross-sector collaboration, and actively involve the

community so that the strategies implemented are really able to significantly and sustainably reduce the poverty rate.

Keywords: *Strategy, Local Government, Poverty, Policy.*

Article History :

Received 16-03-2026; Revised 02-04-2026; Accepted 26-04-2026

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks dan sulit diatasi, terutama bagi negara-negara berkembang. Kemiskinan di negara berkembang ialah kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, melainkan juga akibat dari sistem yang belum mampu memberikan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Faktor-faktor seperti korupsi, konflik berkepanjangan, rendahnya kualitas pendidikan, serta ketergantungan pada sektor informal menjadi penyebab utama yang memperparah kemiskinan. Tidak sedikit anak-anak yang harus bekerja sejak usia dini demi membantu kebutuhan keluarga, sementara akses mereka terhadap pendidikan terputus.

Kemiskinan juga memperkuat siklus ketertinggalan. Tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat internasional dalam bentuk kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, keluarga miskin akan terus terperangkap dalam kondisi yang sama dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama—baik dari pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun individu—untuk menciptakan sistem yang lebih adil, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses setara terhadap kebutuhan dasar, (Resky 2023).

Critianto Leasiwal menyatakan bahwa “Kemiskinan di negara berkembang adalah isu yang cukup rumit, meskipun beberapa di antaranya telah berhasil dalam pembangunan produksi dan pendapatan nasional.” Kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal di sana, (Leasiwal 2013).

Kemiskinan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memberikan efek yang merugikan kehidupan. Biaya pembangunan ekonomi akan meningkat karena kemiskinan, yang pada akhirnya dapat menghentikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kemiskinan berdampak pada produktivitas, pendapatan, dan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan juga terkait dengan masalah sosial seperti penurunan pelayanan kesehatan, peningkatan aktivitas kriminal di perkotaan, dan masalah lainnya. Akibatnya, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan upaya yang menyeluruh yang melibatkan semua aspek kehidupan, (Setiawan, Muchtar, and Sihombing 2024). Salah satu dampak kemiskinan adalah menjadi pemicu berbagai kejahatan. Karena terdesaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan kurangnya lapangan kerja, orang miskin terkadang melakukan tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan, (Safuridar 2018).

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia meskipun berbagai kemajuan telah dicapai. Hingga Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau sekitar 8,47% dari total populasi. Angka ini mencatatkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya dan merupakan yang terendah dalam sejarah penghitungan statistik kemiskinan nasional. Meski begitu, ketimpangan sosial dan ekonomi masih terasa, terutama di daerah

pedesaan dan sektor informal. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya strategis melalui kebijakan dan regulasi. Salah satunya adalah pembentukan Badan Percepatan Penghapusan Kemiskinan (BP2K) melalui Peraturan Presiden No. 163 Tahun 2024, yang bertugas mengkoordinasikan program lintas kementerian. Selain itu, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi agar lebih banyak masyarakat miskin terserap ke sektor formal. Pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, bantuan pangan, dan program makan bergizi gratis. Dengan pendekatan berbasis regulasi ini, diharapkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem di masa mendatang, (Mansur 2024).

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui sistem ekonomi yaitu difokuskan pada pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ini identik dengan upaya peningkatan pendapatan per kapita, yang biasanya disebut sebagai strategi pertumbuhan ekonomi. Diharapkan, dengan meningkatnya pendapatan per kapita, masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat teratasi, (Safuridar 2018). Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan di Provinsi Jambi masih menjadi persoalan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sebagian besar penduduk miskin di daerah ini tinggal di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan masih terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja, sehingga banyak masyarakat hanya bisa bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja formal dan kurangnya diversifikasi ekonomi di luar sektor primer membuat masyarakat sulit keluar dari jerat kemiskinan. Permasalahan ini diperparah oleh penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran akibat kelemahan dalam pendataan dan pengawasan.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mencakup pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta perbaikan sistem perlindungan sosial yang lebih akurat dan berkelanjutan. Maka dari itu terbentuklah kebijakan tentang kemiskinan yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Jambi yang mengatur tentang kemiskinan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Ke Kabupaten/Kota Untuk Kelurahan dan Kecamatan.

Kota Jambi adalah salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Kota Jambi merupakan wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi. Meskipun sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi masih menghadapi berbagai persoalan terkait kemiskinan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan lapangan kerja formal, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat miskin menggantungkan hidupnya pada sektor informal dengan penghasilan yang rendah dan tidak stabil. Tingginya arus

urbanisasi dari daerah sekitarnya juga menambah beban ekonomi kota, karena tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja yang memadai. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah di kalangan penduduk miskin turut mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akses terhadap layanan dasar seperti perumahan yang layak, air bersih, dan sanitasi juga masih menjadi kendala bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, efektivitas program bantuan sosial yang ada belum sepenuhnya optimal, karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusiannya.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di Kota Jambi memerlukan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan, dengan menekankan pada peningkatan keterampilan kerja, pemerataan pembangunan, serta perbaikan sistem perlindungan sosial. Kemiskinan ialah masalah utama yang dihadapi oleh Kota Jambi yang ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi telah mencatat data presentase penduduk miskin di 11 Kabupaten di Provinsi Jambi yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 1.. Data Penduduk Miskin di Provinsi Jambi

Wilayah	Presentase Penduduk (P0)		
	2022	2023	2024
Provinsi Jambi	279,37	280,68	265,42
Kerinci	18,2	18,21	16,83
Merangin	34,14	35,19	33,49
Sarolangun	26,23	26,77	26,54
Batanghari	26,24	25,88	23,74
Muaro Jambi	20,64	20,83	17,48
Tanjung Jabung Timur	23,42	23,33	21,86
Tanjung Jabung Barat	33,95	33,61	33,12
Tebo	22,81	23,47	22,48
Bungo	20,69	20,65	20,04
Kota Jambi	50,04	50,09	47,25
Kota Sungai Penuh	2,64	2,66	2,6

Sumber: BPS Provinsi Jambi, (STATISTIK and JAMBI 2024)

Dalam tabel 1. data Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi menurut Badan Pusat Statistik(BPS) tersebut terlihat bahwasannya angka kemiskinan di Kota Jambi yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2022 mencapai angka 50,04%, tahun 2023 mencapai angka 50,09%, dan ditahun 2024 mencapai angka 47,25%, pada tahun 2024 telah mengalami penurunan angka kemiskinan, tetapi masih tetap saja menempati angka kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah Daerah Kota Jambi sehingga dengan secepatnya dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi sejahtera dimana kehidupan manusia secara permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan sosial terpenuhi, serta peluang sosial terbuka secara maksimal.

METODE

Teori merupakan sebuah payung bagi peneliti dalam menganalisis masalah yang ditemukan dalam lapangan. Adapun teori, konsep dan metode yang digunakan oleh peneliti adalah teori manajemen strategi dan kebijakan publik. Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pemantauan, analisis, dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perubahan dalam lingkungan bisnis memerlukan organisasi untuk secara rutin menilai strategi mereka agar tetap berhasil. Proses ini membantu organisasi memahami posisi mereka saat ini, merancang strategi, mengimplementasikannya, dan menilai efektivitas dari strategi yang diterapkan, (Arman Paramansyah, 2022). Dalam mencapai sebuah tujuan dibutuhkan strategi yang tepat dalam mencapainya. Semua organisasi memiliki strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menjadi pertimbangan bagi semua organisasi untuk memiliki strategi yang tepat. Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Bila suatu organisasi mempunyai suatu “strategi”, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi, (Jatmiko Wahyu Nugroho, 2024).

Sedangkan teori kebijakan publik adalah studi mengenai bagaimana pemerintah membuat keputusan untuk mengatasi masalah di masyarakat. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, di mana kebijakan dapat berupa sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Teori ini mempelajari proses dari perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi dampaknya terhadap publik. dalam proses kebijakan publik terdiri dari Perumusan: Tahap ini melibatkan identifikasi masalah, penyusunan alternatif solusi, dan perancangan peraturan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Implementasi: Tahap ini adalah pelaksanaan keputusan kebijakan, yang bisa berupa undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan pengadilan. Evaluasi: Proses mengevaluasi dampak dari pelaksanaan kebijakan terhadap publik adalah bagian integral dari teori ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kota Jambi memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan sebagai salah satu persoalan mendasar yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang tinggi tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, dan rendahnya kualitas pendidikan serta kesehatan. Sejalan dengan visi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya, pemerintah daerah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan yang terarah dan program-program yang terintegrasi.

Strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi

Sebagai institusi pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan berbagai regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penanggulangan

Kemiskinan serta berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi mikro. Kemudian juga terdapat juga program-program dalam penanggulangan kemiskinan di kota Jambi, terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis Perorangan dan keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Pemerintah Daerah Kota Jambi terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai program dan upaya yang terencana dan terintegrasi, yang ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan strategis:

Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu, dalam upaya ini, pemerintah meluncurkan berbagai bantuan, termasuk program Kartu Jambi Cerdas (KJC) yang memberikan dukungan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Kartu Jambi Bugar (KJB) memberikan bantuan iuran kesehatan, serta program kartu kendali gas LPG 3kg yang membantu meringankan beban biaya energi. Pemerintah juga menyediakan bantuan sosial berupa paket sembako, bantuan tunai, dan berbagai bentuk dukungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kedua, Pemberdayaan masyarakat kurang mampu, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, pemerintah daerah kota jambi melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan yang dirancang untuk membekali masyarakat dengan kemampuan yang relevan. Selain itu, bantuan peralatan usaha diberikan kepada pelaku usaha kecil agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Ketiga, Mengurangi kantong-kantong kemiskinan, upaya ini melibatkan program bedah rumah untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat yang kurang layak. Selain itu, perluasan jaringan air bersih dan pembangunan infrastruktur dasar lainnya, seperti jalan dan akses transportasi, menjadi fokus utama dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas yang memadai. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program seperti Kartu Jambi Cerdas (KJC), Kartu Jambi Bugar (KJB), serta pelatihan keterampilan dan bedah rumah, angka kemiskinan di Kota Jambi tetap menempati posisi tertinggi di Provinsi Jambi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam dan penguatan dalam perumusan serta implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana strategi Pemerintah Kota Jambi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta hambatan yang dihadapi. Pendekatan ini diperkuat dengan teori kemiskinan

menurut Chambers, yang meliputi lima dimensi: kemiskinan itu sendiri, ketidakberdayaan, kerentanan, ketergantungan, dan keterasingan. Dengan demikian, diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan berbasis partisipasi masyarakat, transparansi data, serta integrasi program antar OPD, agar reformasi sosial di bidang kesejahteraan benar-benar dapat diwujudkan.

Pengamatan Lingkungan

Dalam perumusan strategi, langkah awal yang paling krusial adalah memahami dengan tepat posisi organisasi di tengah dinamika lingkungannya. Sebuah organisasi, termasuk institusi pemerintahan seperti Pemerintah Daerah, tidak berdiri di ruang hampa. Ia selalu berhadapan dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang terus berubah. Oleh karena itu, strategi yang efektif tidak bisa dirumuskan tanpa terlebih dahulu melakukan pengamatan lingkungan secara komprehensif. Tujuannya adalah agar organisasi dapat mengenali potensi yang dimiliki serta memahami risiko dan tantangan yang harus diantisipasi. Tanpa pengamatan lingkungan yang akurat, strategi yang disusun akan bersifat spekulatif dan berisiko gagal dalam implementasi.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi, pengamatan lingkungan menjadi langkah awal yang sangat menentukan arah kebijakan. Pemerintah Daerah harus mampu membaca peta sosial ekonomi masyarakat secara faktual: sejauh mana kemiskinan tersebar, siapa saja kelompok rentan yang terdampak, dan apa saja faktor penyebabnya. Di Kota Jambi, hasil pengamatan lingkungan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Jambi, yakni mencapai 50,09% pada 2023 dan menurun menjadi 47,25% pada 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024). Angka ini menunjukkan adanya perbaikan, tetapi tetap menjadi peringatan serius karena hampir separuh penduduk masih berada dalam garis kemiskinan. Pemerintah Kota Jambi mengidentifikasi bahwa penyebab utamanya antara lain keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin, serta tingginya ketergantungan pada sektor informal dengan penghasilan yang tidak stabil. Selain itu, faktor urbanisasi juga memperburuk kondisi, karena banyak pendatang dari daerah sekitar yang menambah beban ekonomi kota tanpa diiringi peningkatan kesempatan kerja yang memadai (Taufiq, Junaidi, and Denmar 2024).

Perumusan Strategi

Dalam proses perencanaan strategis, perumusan strategi menjadi langkah penting yang menentukan arah dan cara organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tidak hanya menjadi peta jalan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan merespons dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Organisasi menyusun strategi berdasarkan hasil analisis situasi dan posisi, baik dari aspek kekuatan dan kelemahan internal maupun peluang dan ancaman eksternal. Dengan demikian, strategi yang dipilih harus selaras dengan visi, misi, dan kapabilitas organisasi.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Jambi. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu menjawab tantangan kemiskinan yang bersifat multidimensi. Strategi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial semata, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan

kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap layanan dasar. Pemerintah Daerah Kota Jambi menyusun strategi berdasarkan hasil analisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Pelibatan berbagai pihak dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Perumusan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi tidak hanya sebatas teori manajemen strategis, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang berlandaskan regulasi daerah. Hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan empat arah utama strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, memperkuat keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program secara terpadu (Perda Jambi 2020). Implementasi dari perumusan strategi tersebut diperkuat melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tahun 2024, yang melibatkan pemerintah daerah, OPD, akademisi, lembaga adat, BAZNas, Bulog, dan masyarakat. Kehadiran TKPK menunjukkan bahwa strategi tidak hanya diformulasikan secara top-down, melainkan juga menekankan kolaborasi lintas sektor agar lebih efektif menyentuh akar persoalan.

Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tahap lanjutan yang sangat krusial setelah perumusan strategi dilakukan. Strategi yang hanya tertuang dalam dokumen perencanaan tanpa diikuti dengan pelaksanaan nyata tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, implementasi strategi harus diwujudkan melalui berbagai penyesuaian dalam struktur organisasi, kebijakan, serta prosedur operasional. Perubahan struktur organisasi dilakukan untuk memastikan bahwa unit atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan strategi memiliki posisi dan kewenangan yang jelas. Sementara itu, kebijakan dan prosedur yang ada juga perlu disesuaikan agar selaras dengan arah strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi strategi menuntut adanya koordinasi lintas sektor dan pengelolaan sumber daya yang efektif, baik dari sisi anggaran, tenaga kerja, maupun sarana pendukung lainnya. Tanpa adanya koordinasi dan dukungan sumber daya yang memadai, strategi yang telah dirancang tidak akan dapat dijalankan secara optimal.

Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah melakukan berbagai penyesuaian terhadap struktur organisasi dan program kerja perangkat daerah terkait. Dinas Sosial, misalnya, tidak hanya bertugas menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mendorong program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, dan penguatan ekonomi keluarga. Strategi ini juga dilengkapi dengan kolaborasi antarinstitusi, baik vertikal (dengan pemerintah pusat dan provinsi) maupun horizontal (lintas OPD dan mitra masyarakat), guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara terpadu.

Pemerintah Daerah Kota Jambi telah merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dan terpadu, dengan memadukan pendekatan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Strategi ini tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani dampak

kemiskinan, tetapi juga bersifat preventif dan transformatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dan mendorong kemandirian ekonomi.

Lebih lanjut, salah satu implementasi nyata strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi adalah melalui Program Gotong Royong yang difokuskan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Program ini diwujudkan dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (Bedah Rumah) yang melibatkan kolaborasi multipihak, yaitu Pemerintah Kota Jambi, Kementerian PUPR, serta Baznas. Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, meresmikan secara langsung program tersebut pada Oktober 2023 sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat miskin ekstrem yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (A. Bakar Hendra 2023).

Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan upaya penting yang harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh, terutama oleh pemerintah daerah dalam menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya di Kota Jambi adalah melalui program bedah rumah, yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (Saputra 2022), menyampaikan bahwa implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi melalui program bedah rumah terbukti membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Meskipun program ini telah memberikan manfaat langsung, seperti peningkatan kenyamanan dan kualitas hidup, namun dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya validasi data penerima manfaat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya integrasi dengan program lain yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, strategi ini belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat parsial dan perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi telah dilakukan melalui penyesuaian struktur organisasi, kebijakan, dan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mendorong pelatihan dan penguatan ekonomi keluarga. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti data penerima bantuan yang tidak akurat dan praktik pendataan yang tidak objektif, di mana bantuan justru diterima oleh orang-orang yang dekat dengan aparat desa. Selain itu, mentalitas sebagian masyarakat yang masih bergantung pada bantuan meski sudah mampu juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, strategi yang sudah baik perlu didukung oleh pembaruan data yang rutin, pengawasan yang ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Evaluasi Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian merupakan tahap penting dalam manajemen strategi, karena berfungsi untuk menilai sejauh mana implementasi program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kelemahan. Menurut Wheelen dan Hunger, evaluasi strategi harus mencakup peninjauan kembali faktor eksternal dan internal, pengukuran kinerja, serta upaya perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, strategi

penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada perumusan dan pelaksanaan saja, tetapi harus selalu diawasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Evaluasi dan pengendalian merupakan tahapan penting dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Dinas sosial secara berkala melakukan rapat evaluasi untuk memantau efektivitas program yang dijalankan, seperti PKH, BPNT, maupun program bedah rumah. Sebagai contoh, pada tahun 2023 sebanyak 4.995 warga Jambi dihapus dari daftar penerima bansos setelah diverifikasi dan terbukti sudah tidak layak menerima bantuan karena dianggap mampu (Ferdi Almunanda 2023). Langkah ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol berbasis data dan pengawasan lapangan.

Selain itu, evaluasi juga terlihat dari data BPS Provinsi Jambi yang mencatat fluktuasi angka kemiskinan, pada September 2024 jumlah penduduk miskin meningkat 7.300 orang dibanding Maret 2024, namun per Maret 2025 angka tersebut kembali turun menjadi 270,94 ribu jiwa atau 7,19% (Jambi Prima 2025; Jambi1 2024). Data ini menjadi bahan evaluasi penting bahwa meskipun ada intervensi program, tantangan struktural seperti keterbatasan lapangan kerja dan ketidakakuratan data masih mempengaruhi capaian pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan indikator ini, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengendalian adalah bagian penting dalam memastikan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi berjalan dengan baik. Evaluasi tidak hanya melihat hasil program secara teknis, tetapi juga membantu menemukan kelemahan dalam pelaksanaan, seperti ketepatan sasaran dan kejujuran pelaksana. Dari wawancara dengan Bappeda, diketahui bahwa evaluasi sudah dilakukan tiap tahun melalui laporan dari dinas terkait. Namun, kritik dari akademisi menunjukkan masih adanya penyalahgunaan program oleh oknum yang menjadikan kemiskinan sebagai proyek pribadi. Karena itu, evaluasi ke depan perlu lebih kuat, tidak hanya dalam administrasi, tapi juga soal transparansi, kejujuran pejabat, dan melibatkan masyarakat. Dengan evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, strategi ini diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam penanggulangan kemiskinan telah mengacu pada empat tahapan manajemen strategis, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Strategi tersebut diwujudkan melalui program bantuan sosial berbasis keluarga dan individu, program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program berbasis peningkatan akses ekonomi dan infrastruktur. Pemerintah juga menjalankan program seperti Kartu Jambi Cerdas, Kartu Jambi Bugar, pelatihan keterampilan, bantuan peralatan usaha, serta bedah rumah untuk masyarakat miskin. Pendekatan ini menunjukkan upaya yang komprehensif, baik dari aspek perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Namun, strategi yang dijalankan masih belum sepenuhnya optimal dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, Kota Jambi masih menempati posisi tertinggi dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara mendasar. Kurangnya

pemutakhiran data dan belum meratanya distribusi program menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan hasil yang dicapai di lapangan.

Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi perlu diperkuat melalui perbaikan sistem pendataan yang akurat dan berkelanjutan, integrasi program antarinstansi, pengawasan pelaksanaan program secara transparan, serta pelibatan aktif masyarakat dan akademisi. Diperlukan pula pendekatan yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi lebih mendorong pada kemandirian dan transformasi sosial ekonomi warga miskin agar program yang dijalankan benar-benar berdaya guna dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Jambi. 2022. *Kota Jambi Dalam Angka*. Jambi.
- Bappeda Kota Jambi. 2021. "Laporan Kinerja Tahun 2020 Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi." (53).
- Dinas Sosial Kota Jambi. 2023. "Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026." (156).
- Diskominfo Kota Jambi. 2025. "Pemerintah Kota Jambi Kerahkan 265 Petugas Verval Data Kemiskinan Hadirkan Program Tepat Sasaran." *Jambi24jam.Com*. Retrieved (https://www.jambi24jam.com/2025/06/pemerintah-kota-jambi-kerahkan-265.html?utm_source=.com).
- Dr. H. Arman Paramansyah, SE, SH, MM. 2022. *Manajemen Strategis: Strategi, Konsep, & Proses Organisasi*. pustaka al-muqsih.
- Dr. Jatmiko Wahyu Nugroho, S.Kom., M. Si., M. Sc. Ari Wibowo, S.E., C. A. Tr. Asep Kurniawan, S.E., M.M., M.Sc., M. Kom. Arie Surachman, M. DEV. Dr. (C). Farid Subkhan, M.E., CETP. Adi Nugroho, S.T., M.M., CPHRM., M. M. Shamad Hasanul Azmi, S.E., and M. Pd. Yanti Krismayanti, S.E. 2024. *Manajemen Strategi*. Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.
- Fauzi A. 2019. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan." *Jurnal Spektrum Hukum* 16(1):119–36.
- Ferdi Almunanda. 2023. "4.995 Warga Jambi Dihapus Dari Penerima Bansos, Ini Penyebabnya." *Detik.Com*. Retrieved (https://www.detik.com/sumut/berita/d-6607463/4-995-warga-jambi-dihapus-dari-penerima-bansos-ini-penyebabnya?utm_source=chatgpt.com).
- Fransisca, Alex, Murni Agustina, Korupsi Dalam, Dinasti Korupsi, and Sebagai Upaya. 2011. "Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City." *Journal of Regional and City Planning* 22(2):145.
- Grischa, Serafica, cahya dicy pratama. 2022. "Pengertian Kemiskinan Menur." *Kompas.Com* 5 april 2024.
- Hendra, Abu bakar. 2023. "Maulana Resmikan Program Gotong Royong Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Kota Jambi." *Jambikota.Go.Id*. Retrieved September 4, 2025 (https://jambikota.go.id/berita/maulana-resmikan-program-gotong-royong-penanggulangan-kemiskinan-ekstrem-dan-stunting-kota-jambi?utm_source=.com).
- Leasiwal, Teddy Christianto. 2013. "Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku." *Cita Ekonomika-Jurnal Ekonomi* 7(2):196–303.
- Mansur, Yuwarman. 2024. "Analisis Perkembangan Penduduk Miskin, Karakteristik Kemiskinan Dan Kedalaman Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal EMT KITA* 8(1):18–31.

- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Pemerintah Kota Jambi. n.d. “Pemerintah Kota Jambi, ‘Sejarah Kota Jambi.’” Retrieved April 27, 2025 (<https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/>).
- Perda Jambi. 2020. “Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan”.
- Safuridar, Safuridar. 2018. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur.” *Jurnal Ihtiyath* 1(1):11–20.
- Saputra, Jevi. 2022. “Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah Di Kota Jambi.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6(2):241–49.
- Setiawan, Prayoga, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing. 2024. “Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(1):161–71.